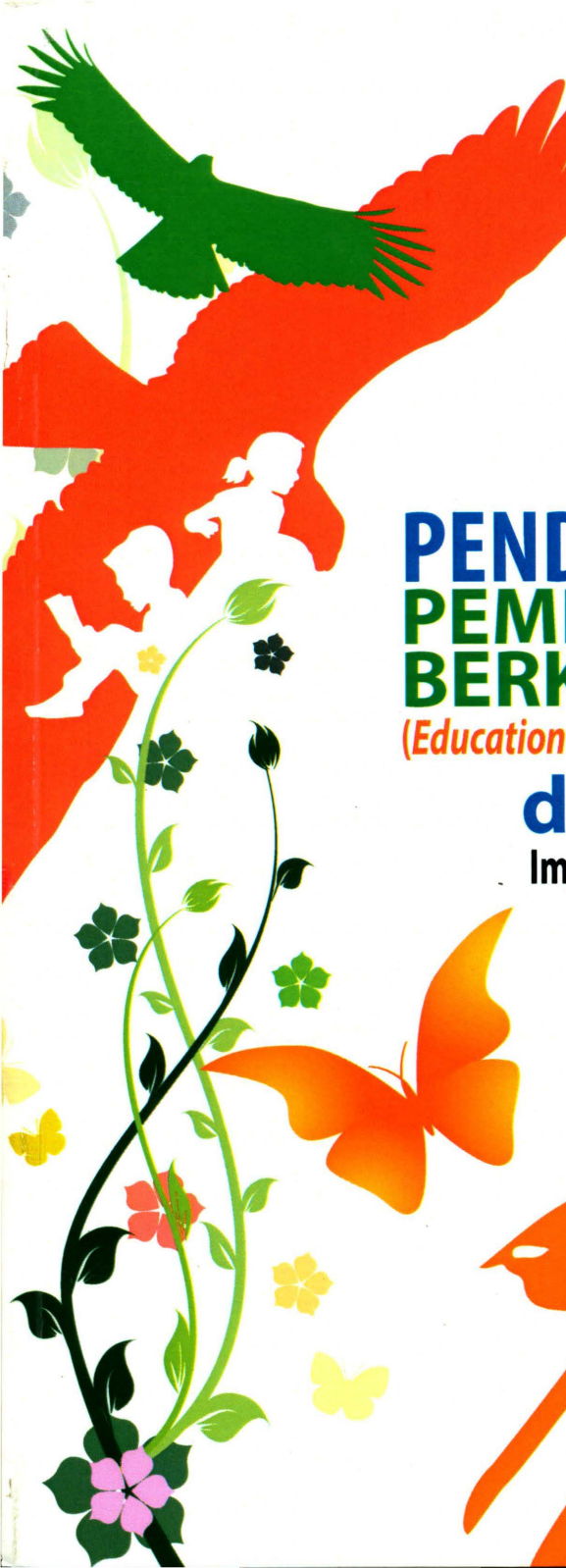
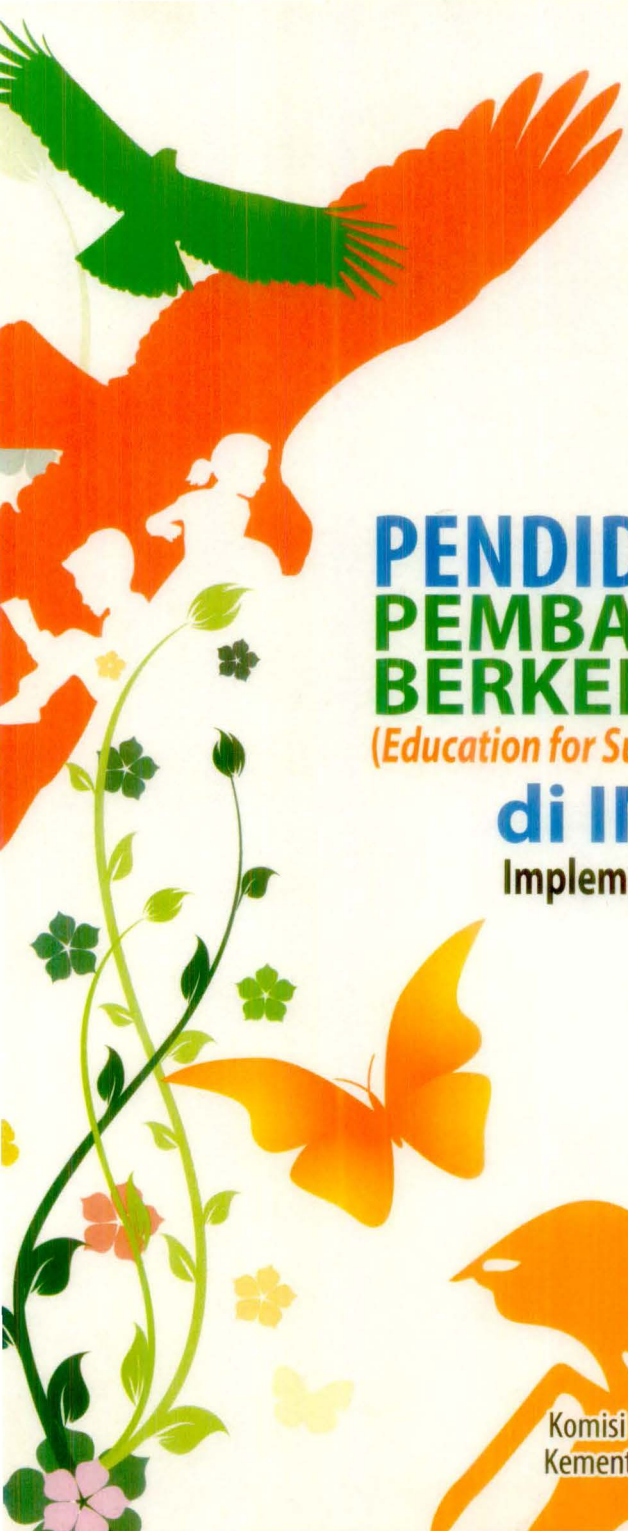




PENDIDIKAN UNTUK **PEMBANGUNAN** **BERKELANJUTAN** *(Education for Sustainable Development)* **di INDONESIA** Implementasi dan Kisah Sukses



Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014



PENDIDIKAN UNTUK **PEMBANGUNAN** **BERKELANJUTAN** *(Education for Sustainable Development)* **di INDONESIA** **Implementasi dan Kisah Sukses**



Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2014

Diterbitkan Oleh:

Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

ISBN : 978-602-70365-1-2

Penasihat :

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH

Pengarah:

Prof. Ainun Na'im, PhD
Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd

Penyunting :

Ananto Kusuma Seta, PhD
Prof. Ir. Noor Endah Mochtar, MSc, PhD

Tim Penulis :

Noor Endah Mochtar
Hasnah Gasim
Hendarman
Noor Indrastuti
Aulia Wijiasih
Cecep Suryana
Kurniati Restuningsih
Santi Laila Tartila

Penanggung Jawab :

Yun Widiati

Sekretariat :

Rameli
Adi Nuryanto
Purwono

Desain / Layout :

Akhmad Rofiqi
Novrian

Lampiran 1

Keputusan Sekretaris Jenderal

Nomor : 046010/A/A2.4/LN/2014

Tanggal : 7 Maret 2014

**DAFTAR KELOMPOK KERJA PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN ATAU EDUCATION FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD) KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014-2015**

Pengarah : 1. Ainun Na'im
2. Arief Rachman

Ketua : Ananto Kusuma Seta
Sekretaris : Noor Endah Mochtar
Anggota : 1. A. Tuti Rumiati
2. Arie Trestiani
3. Aulia Wijiasih
4. Cecep Suryana
5. Elly Heryani
6. Hasnah Gasim
7. Hendarman
8. Kurniati Restuningsih
9. Nanik Suwaryani
10. Nanis Setyowati
11. Noor Indrastuti
12. Nurma Dewi Saleh
13. Sri Renani Pantjastuti
14. Widyo Winarso
15. Yenni Hendrayani
16. Yun Widiati

Sekretariat : 1. Adi Nuryanto
2. Purwono Wijyanto
3. Rameli
4. Santi Laila Tartila



Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa buku dengan judul **“Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*) di Indonesia:**

Implementasi dan Kisah Sukses” ini telah selesai diterbitkan. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memaparkan sejauh mana Pemerintah Indonesia telah membuat rintisan dan terobosan dalam implementasi ESD di sekolah sebagai komitmen dan dukungan Indonesia terhadap program PBB di bidang pendidikan, yaitu *“Decade for Education for Sustainable Development/DESD”* untuk tahun 2005-2014. Dalam buku ini diuraikan konsep akademik tentang pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan disertai sejumlah contoh-contoh rintisan dan terobosan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam penerapan ESD, terutama dalam rentang tahun 2005-2014. Sebagai orang Indonesia kita seharusnya bangga karena prinsip-prinsip ESD ternyata sudah sejak lama ada dan diterapkan dalam system pendidikan di Indonesia sendiri, hanya belum secara jelas disadari keterkaitannya dengan ESD.

Hal-hal yang mendasari perlunya pembangunan yang sifatnya berkelanjutan telah diuraikan di Bab 1. Visi, prioritas, tujuh kriteria, dan sebelas tema ESD dijabarkan dengan rinci dalam Bab 2. Begitu juga konsep ESD yang sejak lama telah diterapkan di satuan pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diuraikan dalam Bab 3. Dalam Bab 4 dijelaskan Kurikulum 2013 yang merupakan perwujudan konsep dan aplikasi ESD untuk bangsa indonesia. Beberapa contoh kisah sukses implementasi

ESD di 20 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta pendidikan Non Formal di Indonesia, yang disajikan dalam foto-foto, diberikan dalam Bab 5. Tidak ketinggalan dalam Bab 6 diuraikan juga peluang dan tantangan dalam implementasi ESD di Indonesia.

Dengan diterbitkannya buku ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini senantiasa memberikan dukungannya kepada KNIU dalam melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ESD. Selain itu, ucapan banyak terima kasih juga harus kami sampaikan kepada Kelompok Kerja ESD Kemendikbud yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran mereka untuk mewujudkan buku ini. Semoga tulisan dalam buku ini dapat memberi pemahaman yang lebih baik bagi para pembaca, khususnya para pendidik di Indonesia, tentang penerapan ESD di Indonesia, yang ternyata bukanlah hal baru sama sekali bagi Indonesia.

Jakarta, Agustus 2014

Ketua Harian

Komisi Nasional Indonesia
untuk UNESCO

Arief Rachman



Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

Menatap Masa Depan

Hanya bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat yang mampu mengatasi persoalan zamannya. Penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia agar mampu mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini menjadi lebih kritis apabila dikaitkan dengan berkah demografi Indonesia. Pada tahun 2010 penduduk Indonesia pada rentang usia 0-9 tahun mencapai kurang-lebih 45,9 juta jiwa, sementara usia 11-19 tahun mencapai kurang-lebih 43,55 juta jiwa. Dalam rentang tahun 2010-2035 jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif sangat melimpah yang mana mereka akan menjadi generasi emas yang bakal menjadi generasi penerus bangsa ini.

Menghadapi masa depan bukan berarti kita harus berdiam diri dan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki selama ini. Kita dituntut untuk mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia Indonesia dengan sistem perlindungan lingkungan alam sehingga kebutuhan tersebut dapat memenuhi tidak hanya untuk saat ini, tetapi dalam waktu yang tidak terbatas, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki komitmen untuk mewujudkan pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan terciptanya pembangunan yang ramah lingkungan (*environmentally sound*), menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), dan diterima secara sosial (*socially acceptable*). Di samping itu tiga pilar pembangunan

berkelanjutan menjadi pijakan pelaksanaan program pendidikan, yaitu pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang. Untuk itu, program pendidikan diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.

Inisiatif tersebut sekaligus menunjukkan komitmen dan dukungan Indonesia terhadap kesepakatan pada *World Summit on Sustainable Development* yang diselenggarakan di Johannesburg pada Desember 2002, dimana PBB menerima usulan berupa “*Decade for Education for Sustainable Development (DESD)*” sebagai UNDESD Tahun 2005-2014. Tujuan dari UNDESD adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan praktek pembangunan yang berkelanjutan ke dalam aspek-aspek pendidikan dan pembelajaran. Berbagai inisiatif dan terobosan terkait Pendidikan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan telah dilakukan Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dukungan Pemerintah Indonesia. Inisiatif dan terobosan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak swasta dan kerja sama organisasi internasional. Kurikulum 2013 menjadi momentum perwujudan konsep dan aplikasi Pendidikan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Melalui Kurikulum 2013 itu, anak-anak kita akan memiliki kompetensi secara utuh yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan generasi emas, yaitu generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, berkarakter, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia.

Kemendikbud mengapresiasi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan menyambut baik atas diterbitkannya buku **Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for***

Sustainable Development/ESD) di Indonesia: Implementasi dan Kisah Sukses. Buku ini memaparkan konsep akademik tentang pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan disertai uraian tentang sejumlah rintisan dan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia khususnya dalam kerangka 2005-2014.

Jakarta, Agustus 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad NUH

Daftar Isi

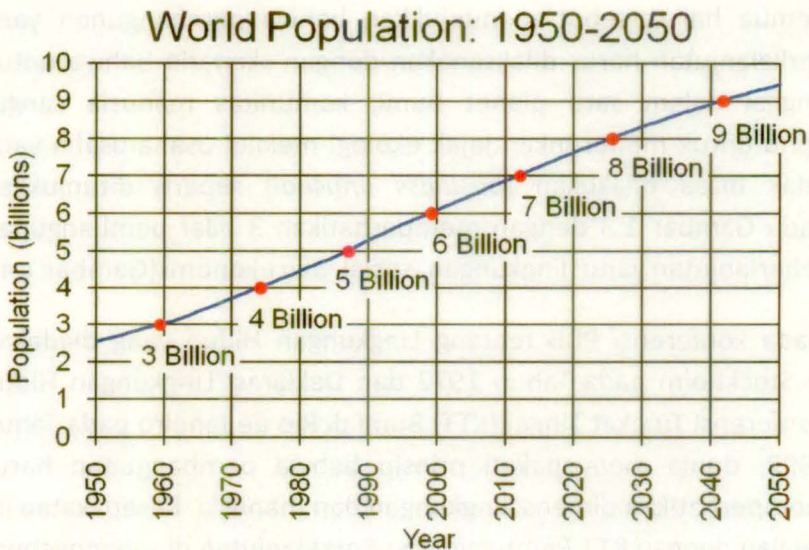
Kata Pengantar	v
Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	vii
Daftar Isi	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development)	1
1.2 <i>Millenium Development Goals (MDGs) dan United Nation Partnership for Development Framework (UNPDF)</i>	5
1.2.1 <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i>	5
1.2.2 <i>United Nation Partnership for Development Framework (UNPDF)</i>	6
1.3 Peran UNESCO dalam Implementasi <i>Education for Sustainable Development (ESD)</i>	7
BAB 2 EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT/ESD	9
2.1 <i>Education for Sustainable Development/ESD</i>	9
2.2 Prioritas ESD	10
2.3 Kriteria ESD	11
2.4 Tema ESD	13
2.5 Kerangka Pembelajaran Abad 21	15
BAB 3 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD)	17
3.1 ESD dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	19
3.2 Kebijakan dan Kesepakatan Terkait ESD dalam Pendidikan Nasional	28
3.3 Program Kerja Sama Bidang Pendidikan Terkait ESD	30

BAB 4 PENGARUSUTAMAAN (MAINSTREAMING) ESD DALAM KURIKULUM 2013	33
4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pengembangan Kurikulum 2013	33
4.2 Karakteristik Kurikulum 2013	35
4.3 Tujuan Kurikulum 2013	36
4.4 Kerangka Dasar Kurikulum 2013 dan Strukur Kurikulum Sekolah	36
4.5 Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum 2013	39
4.6. Pengembangan Muatan Lokal	41
4.7 Standar Proses Pendidikan	44
BAB 5 KISAH SUKSES IMPLEMENTASI ESD	47
BAB 6 PELUANG DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI ESD DI INDONESIA	65
6.1 Peluang dalam Implementasi ESD di Indonesia	65
6.2 Tantangan dalam Implementasi ESD di Indonesia	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran	73
Lampiran 1: Perkembangan ESD dalam Proses Pembelajaran di Indonesia	74
Lampiran 2: Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan Kurikulum 2013 Terkait ESD	80

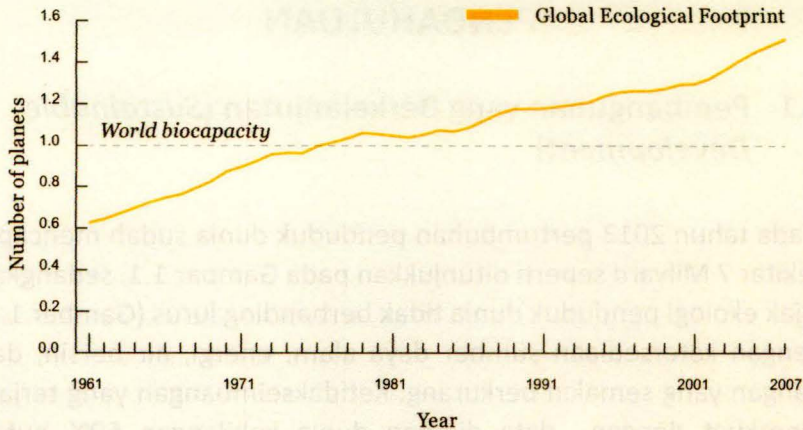
Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk dunia sudah mencapai sekitar 7 Milyard seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1, sedangkan jejak ekologi penduduk dunia tidak berbanding lurus (Gambar 1.2) dengan ketersediaan sumber daya alam, energi, air bersih, dan pangan yang semakin berkurang. Ketidakeimbangan yang terjadi diperkuat dengan data dimana dunia kehilangan 50% hutan tropis, konsentrasi CO₂ di atmosfer meningkat lebih dari 25% yang menyebabkan perubahan iklim ekstrim, pelanggaran Hak Asasi, dan kemiskinan dimana sekitar 850 juta penduduk dunia mengalami kekurangan pangan.



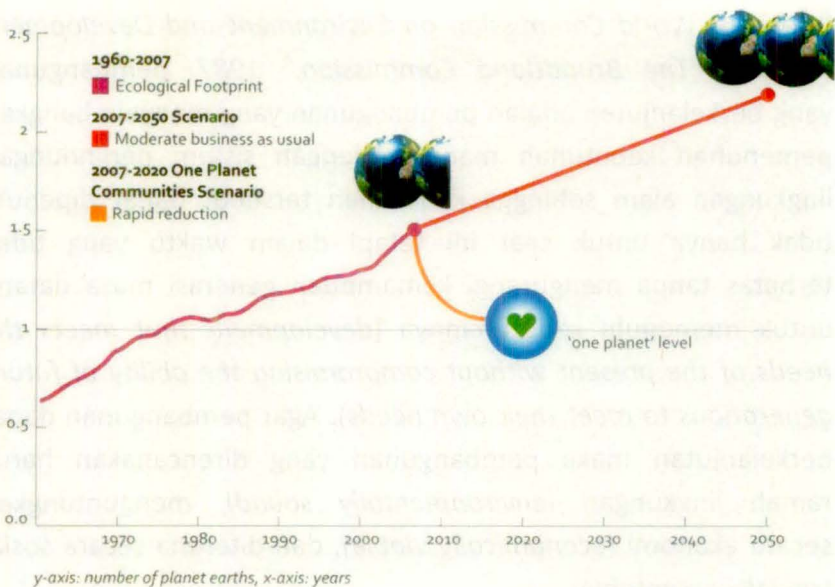
Gambar 1.1 Pertumbuhan penduduk dunia (*US Bureau of the census, International Data Base, 2011 Update*)



Gambar 1.2 Jejak ekologi penduduk dunia 1961-2007 (*Global Footprint Network, 2010*)

Semua hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan dengan skenario bahwa untuk tinggal dalam satu planet bumi, komunitas manusia sangat perlu untuk menurunkan jejak ekologi melalui usaha-usaha yang tidak biasa dilakukan (*business unusual*) seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3 dengan memperhatikan 3 pilar pembangunan keberlanjutan yaitu: lingkungan, sosial, dan ekonomi (Gambar 1.4).

Pada konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm pada Tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada Tahun 1992, dunia menyepakati prinsip bahwa pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. Kesepakatan ini sejalan dengan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg pada Tahun 2002 yang membahas cara mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.



Gambar 1.3 Skenario komunitas manusia untuk menurunkan jejak ekologi melalui “business unusual” (Global Foot Print Network, 2012)



Gambar 1.4 Tiga pilar pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), "*The Brundtland Commission*," 1987, pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan manusia dengan sistem perlindungan lingkungan alam sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya untuk saat ini tetapi dalam waktu yang tidak terbatas tanpa mengurangi kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhannya (*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*). Agar pembangunan dapat berkelanjutan maka pembangunan yang direncanakan harus ramah lingkungan (*environmentally sound*), menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), dan diterima secara sosial (*socially acceptable*).

Berdasarkan kesepakatan dunia tersebut maka Pembangunan Nasional Republik Indonesia dilandasi pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara seperti tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang lestari dan berkesinambungan sangat penting untuk memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diperhatikan secara seksama sesuai mandat yang terkandung dalam Program Pembangunan Nasional: mendayagunakan sumber daya alam sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.

1.2 Millenium Development Goals (MDGs) dan United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF)

1.2.1 Millenium Development Goals (MDGs)

Pada awal Tahun 2000, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang merupakan suatu tujuan bersama secara internasional untuk pengembangan pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable human development*) yang ditujukan pada hal-hal penting yang perlu dihapus dari muka bumi ini. Ada 8 (delapan) tujuan dari MDGs seperti diuraikan pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5 Skema 8 (delapan) tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs)

Capaian implementasi MDGs selalu dimonitor dan dievaluasi setiap tahun oleh PBB. Tahun 2015 adalah tahun terakhir implementasi MDGs. Oleh sebab itu, PBB membentuk kelompok; *open working group* (terdiri dari 30 negara anggota *Rio+20*), *UN Task Team*, dan Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka (*High Level Panel of Eminent Person/HLPEP*) untuk menyiapkan kelanjutan dari MDGs, yang lebih dikenal dengan “*Beyond 2015*”.

1.2.2 *United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF)*

United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dan PBB untuk mengidentifikasi strategi dimana PBB dapat mendukung program prioritas nasional Indonesia. Dokumen UNPDF diluncurkan pada 2005 dan akan berakhir pada saat yang bersamaan dengan pencapaian target MDGs yaitu 2015. Program-program yang diimplementasi dan dikerjakan samakan yang diangkat dalam lima tahun terakhir (2010-2015) sangat krusial dalam membantu Indonesia untuk mencapai MDGs.

Ada 11 prioritas nasional yang dituliskan di dalam UNPDF yaitu:

Prioritas 1- Reformasi Birokrasi dan Tata Laksana

Prioritas 2- Pendidikan

Prioritas 3- Kesehatan

Prioritas 4- Pengurangan Kemiskinan

Prioritas 5- Penguatan Pangan

Prioritas 6- Infrastruktur

Prioritas 7- Iklim Investasi dan Iklim Bisnis

Prioritas 8- Energi

Prioritas 9- Lingkungan dan Manajemen Penanggulangan Bencana

Prioritas 10- Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Prioritas 11- Budaya, Kreativitas, dan Teknologi Inovasi

1.3 Peran UNESCO dalam Implementasi *Education for Sustainable Development (ESD)*

MDGs dan UNPDF meletakkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam rangka menyiapkan masyarakat dunia yang pro kepada pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai *Education for Sustainable Development (ESD)*. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut dalam rangka terciptanya masa depan yang berkelanjutan (*sustainable future*) maka pendidikan memegang peran penting untuk membentuk manusianya.

Pada “*World Summit on Sustainable Development*”, Desember 2002 di Johannesburg, Pemerintah Jepang dan NGO mengusulkan “*Decade for Education for Sustainable Development (DESD)*” yang kemudian diterima oleh PBB sebagai UNDESD Tahun 2005-2014. Tujuan dari UNDESD adalah **mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan praktek pembangunan yang berkelanjutan ke dalam aspek-aspek pendidikan dan pembelajaran.**

Dalam implementasi ESD, UNESCO sebagai komisi pendidikan PBB ditunjuk untuk menjadi koordinator (*Lead Agency*) dengan peran sebagai berikut:

1. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta, media dan pemuda
2. Mendorong untuk program riset yang berwawasan ESD
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi
4. Berbagi praktek yang berhasil dari pelaksanaan ESD
5. Membuat forum untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk ESD
6. Mendorong negara anggota UNESCO untuk melaksanakan 4 prioritas ESD



Bab 2

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT/ ESD

2.1 Education for Sustainable Development/ESD

Education for Sustainable Development (Pendidikan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan) merupakan proses pembelajaran (atau pendekatan terhadap pengajaran) yang didasarkan pada cita-cita luhur dan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dengan memusatkan perhatian pada semua tingkat dan jenis pembelajaran dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan pengembangan pembangunan manusia yang berkelanjutan – ***“learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do and learning to transform oneself and society.”*** (www.unescobkk.org/education/esd-unit/definition-of-esd).

Menurut UNESCO, ESD adalah tentang belajar untuk:

- menghormati, menghargai, dan melestarikan prestasi atau nilai-nilai keberhasilan masa lalu;
- menghargai keajaiban-keajaiban dan orang-orang di muka bumi;
- menghuni/tinggal di dunia dimana semua orang memperoleh cukup makanan untuk kehidupan yang produktif dan sehat;
- memanfaatkan, merawat, dan memperbaiki kondisi alam kita;
- membuat dan menikmati dunia yang lebih adil, aman, dan lebih baik;
- menjadi warga dunia yang lebih peduli dalam menggunakan hak-hak dan tanggung jawab mereka secara lokal, nasional, dan global.

ESD dalam implementasinya didasari oleh ide-ide yang relevan dengan kepentingan lokal dan budaya lokal sehingga program ESD akan memiliki beragam keunikan pendekatan di seluruh dunia. Dalam kontribusinya, ESD ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan cara pemberdayaan manusia melalui pendidikan dimana semua orang memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab demi menciptakan dan menikmati masa depan yang berkelanjutan (UNESCO, 2005a UNDESD).

Slogan untuk ESD yang sangat dikenal yaitu **belajar tentang perubahan dan belajar untuk berubah** atau *"learning for change and learning to change"*.

Visi ESD dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Semua orang memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pendidikan yang berkualitas, belajar nilai-nilai, tingkah laku, dan gaya hidup yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan dan untuk transformasi masyarakat yang positif.
2. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang bermartabat.

2.2 Prioritas ESD

ESD pertama kali dijelaskan pada Bab 36 Agenda 21 yang dihasilkan dalam Deklarasi Lingkungan Hidup Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro 1992. Ada 4 (empat) prioritas (pendorong utama) dalam mengimplementasikan ESD, yaitu;

1. **Peningkatan dan perbaikan kualitas pendidikan (*promote and improve the quality of education*);**
Menjamin setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk menambah **pengetahuan (*knowledge*)**, **keterampilan (*skill*)**, **nilai-nilai (*values*)**, dan

perspektif yang mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan.

2. **Re-orientasi pendidikan pada semua jenjang untuk pembangunan berkelanjutan (*reorient existing education at all levels to address sustainable development*);**

Menjamin kurikulum dan pedagogi dari pra-sekolah sampai universitas menekankan pada pendidikan, pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), nilai-nilai (*values*), dan perspektif yang berkaitan dengan masa depan yang berkelanjutan. Penekanan terletak pada **re-orientasi kurikulum (bukan pengembangan kurikulum baru)** dan **peningkatan kualitas pendidikan**.

3. **Peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsep pembangunan berkelanjutan (*raise public awareness of the concept of sustainable development*);**

Membangun pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan informal.

4. **Pelatihan sumber daya manusia (*train the workforce*).**

Memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia (pengusaha, institusi, dan masyarakat umum) guna membangun kemampuan untuk membuat keputusan dan unjuk kerja dalam perilaku yang berkelanjutan dan untuk menerapkan praktek-praktek yang sifatnya berkelanjutan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

2.3 Kriteria ESD

Ada 7 (tujuh) kriteria dalam ESD seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1, yaitu:

1. **Fokus pada pembelajar;** berpusat pada siswa, difokuskan pada kebutuhan siswa, kemampuan, minat, dan gaya belajar



Gambar 2.1 Tujuh kriteria pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2005)

dimana guru hanya sebagai fasilitator. Siswa mengonsumsi seluruh waktu belajar, mendorong peserta didik untuk aktif, bertanggung jawab dalam proses penemuan pembelajaran mereka sendiri.

2. **Pendidikan yang interdisiplin dan holistik;** pendidikan pembangunan berkelanjutan ada diberbagai kurikulum, tidak hanya di satu subjek.
3. **Pendidikan yang menggunakan pendekatan beragam metode;** kata-kata, seni, drama, debat, pengalaman, beragam ilmu padagogi. Motivator dan peserta bekerja dan bermain bersama untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.
4. **Pendidikan berbasis pada pendekatan berpikir sistem;** mendorong orang untuk memahami adanya kompleksitas, mencari keterkaitan dan sinergi ketika mencari solusi untuk suatu isu-isu yang mengancam keberlanjutan bumi dan sistem kehidupan.

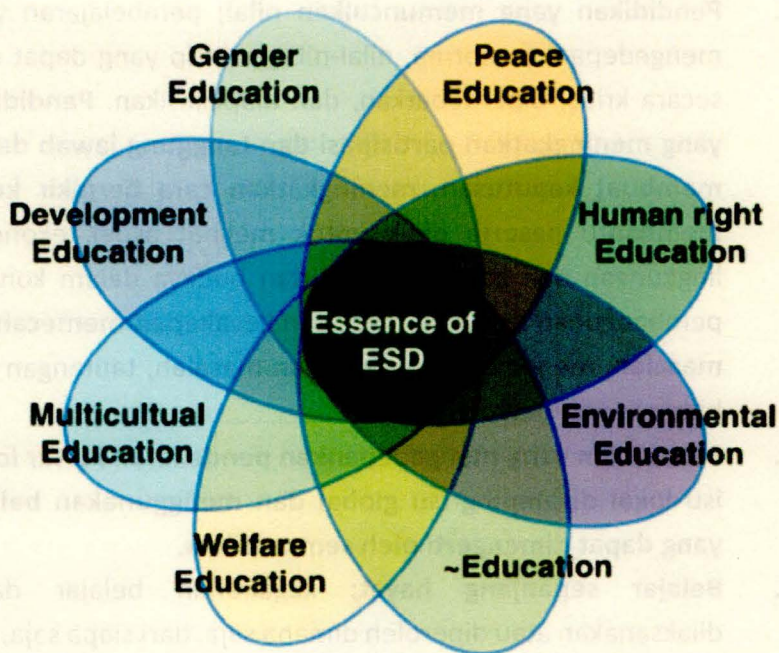
5. **Pendidikan yang memunculkan nilai;** pembelajaran yang mengedepankan norma, nilai-nilai, prinsip yang dapat diuji secara kritis, diperdebatkan, dan diaplikasikan. **Pendidikan yang meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab dalam membuat keputusan, meningkatkan cara berpikir kritis;** membantu peserta didik untuk melihat aspek ekonomi, lingkungan dan struktur sosial dan budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, **dan kecakapan memecahkan masalah,** menemukan pemecahan masalah, tantangan dan hidup secara berkelanjutan.
6. **Pendidikan yang mengedepankan pendekatan kultur lokal, isu lokal disamping isu global dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak.**
7. **Belajar sepanjang hayat;** kegairahan belajar dapat dilaksanakan atau diperoleh dimana saja, dari siapa saja, dan kapanpun, oleh siapapun tanpa memandang gender dan strata sosial serta usia; semua pihak bisa jadi pembelajar dan menjadi sumber belajar.

Jadi ESD dicirikan berada di setiap mata pelajaran yang dilaksanakan secara terpadu [*holistic*] seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2.

2.4 Tema ESD

Di dalam implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD), UNESCO telah menentukan 11 (sebelas) tema (isu penting) sebagai berikut:

1. Keanekaragaman hayati (*Biodiversity*),
2. Pendidikan tentang perubahan iklim (*Climate Change Education*),
3. Pengurangan resiko bencana (*Disaster Risk Reduction*),
4. Keanekaragaman budaya (*Cultural Diversity*),



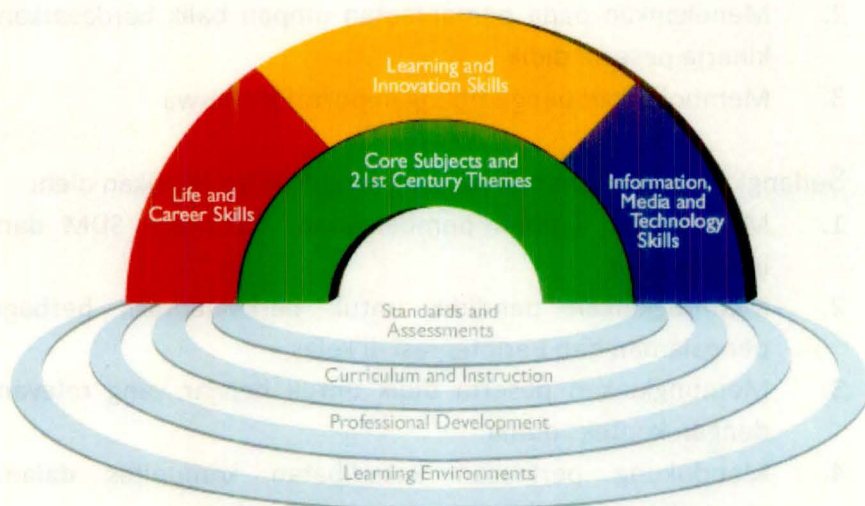
Gambar 2.2 Pendidikan yang interdisiplin dan holistik (UNESCO *Guidelines*, 2005)

5. Pengurangan kemiskinan (*Poverty Reduction*),
6. Kesetaraan gender (*Gender Equality*),
7. Peningkatan kesehatan (*Health Promotion*),
8. Gaya hidup yang berkelanjutan (*Sustainable Lifestyles*),
9. Perdamaian dan keselamatan manusia (*Peace and Human Security*),
10. Air (*Water*), dan
11. Perpindahan penduduk yang berkelanjutan (*Sustainable urbanization*).

2.5 Kerangka Pembelajaran Abad 21

Menurut Trilling dan Fadel (2009) dalam bukunya yang berjudul “*21st Century Knowledge-and-Skills Rainbow Education*, (2008)”, maka kompetensi yang diperlukan dalam kerangka abad 21 mencakup 3 (tiga) kelompok keterampilan, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3, yaitu:

1. Keterampilan kehidupan dan karier (*life and career skills*), Peserta didik harus dicirikan oleh sikap fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, serta kepemimpinan dan tanggung jawab;



Gambar 2.3 Kerangka Pembelajaran Abad 21 /*21st Century Learning Framework (Trilling and Fadel, 2009)*

2. Keterampilan pembelajaran dan inovasi (*learning and innovation skills*)

Peserta didik harus kreatif dan inovatif, berfikir dalam menyelesaikan masalah, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi;

3. Keterampilan informasi, media dan teknologi (*information, media and technology skills*)

Peserta didik harus melek informasi, melek media, dan melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mewujudkan peserta didik dengan keterampilan tersebut maka penilaian standar yang dilakukan harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Mendukung keseimbangan penilaian: tes standar serta penilaian normatif dan sumatif
2. Menekankan pada pemanfaatan umpan balik berdasarkan kinerja peserta didik
3. Membolehkan pengembangan portofolio siswa

Sedangkan lingkungan belajar yang terjadi harus dicirikan oleh:

1. Menciptakan latihan pembelajaran, dukungan SDM dan infrastruktur
2. Memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengalaman dan berintegrasi di kelas
3. Memungkinkan peserta didik untuk belajar yang relevan dengan konteks dunia
4. Mendukung perluasan keterlibatan komunitas dalam pembelajaran, baik langsung maupun *online*

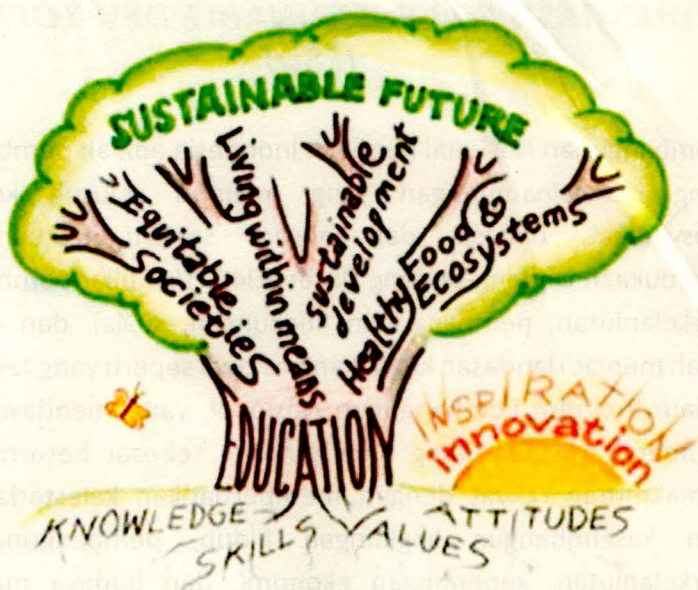
Bab 3

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD)

Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara seperti tertuang pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan, pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi, telah menjadi landasan kebijakan nasional seperti yang terkandung dalam Program Pembangunan Nasional, yaitu mendayagunakan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi, dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Kesalehan berpikir (*wisdom*) akan keseimbangan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan tersebut, sangat diperlukan saat ini agar bumi dapat mempersembahkan kehidupan yang sehat bagi manusia. Kesalehan berpikir inilah yang diharapkan ada dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pendidikan, sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan **masa depan berkelanjutan** (*sustainable future*): **masyarakat berkeadilan** (*equitable societies*), **hidup berkecukupan** (*living within means*), **pembangunan yang berkelanjutan** (*sustainable development*), **makanan sehat** (*healthy food*) dan **ketersediaan energi** (*energy*) serta dapat **hidup lebih bermartabat dan mandiri**. **Mengapa pendidikan penting?** Karena pendidikan diharapkan dapat menjawab tantangan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia dan generasi masa depan yang akan memimpin keberkelanjutan masa depan Indonesia (lihat Gambar 3.1).



Gambar 3.1 Skema tentang pentingnya pendidikan untuk mewujudkan *sustainable future* (Children's Environmental Literacy Foundation/CELF)

Pemerataan pendidikan untuk generasi masa depan Indonesia sudah dimulai dengan program Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*). Di era globalisasi yang disertai dengan permasalahan dunia yang semakin kompleks, bersekolah saja tidaklah cukup. Suatu lembaga pendidikan dan komunitas belajar dituntut tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memberikan kesempatan warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik, tetapi juga menuntut kemampuan pendidik yang memahami pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk keberlanjutan

pembangunan nasional yang lestari dan bermartabat. Lembaga pendidikan dan komunitas belajar dituntut untuk dapat membangun nilai-nilai budi pekerti, kemandirian, kritis, sikap demokratis, kecintaan dan kepedulian pada sumberdaya alam/lingkungan dan budaya lokal/nasional, menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme pada setiap warga Indonesia.

Dalam hal ini ternyata pemerintah Indonesia telah melengkapi setiap kebijakan pendidikan nasional dengan konsep kesalehan berpikir tentang keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan serta cara menumbuhkan dan membangun kapasitas sumber daya bangsa Indonesia yang kritis, bernalar dan bermartabat agar pembangunan Indonesia lestari dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sudah saatnya konsep ESD penting untuk dipahami dan diterapkan oleh seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia.

3.1 ESD dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa:

“pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”

Salah satu dasar pertimbangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 (c) adalah:

“...bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan

mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Bab II, Pasal 3, juga menjelaskan bahwa:

“Pendidikan nasional **berfungsi** mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar **menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab**”.

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab III, Pasal 4, juga dijelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 36 Ayat (3) UU Sisdiknas 2003 menyebutkan bahwa kurikulum hendaknya disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Lebih lanjut Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa “ kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan.....”

Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Kurikulum hendaknya dikembangkan secara berdiversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta di peserta didik.

2. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum menuntut satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum operasional dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Pasal 1 Angka 10 UU Sisdiknas Tahun 2003 menjelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Penjelasan tentang strategi pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang sesuai dengan 7 (tujuh) kriteria ESD telah tersurat dalam UU Sisdiknas 2003 yaitu pada:

- Pasal 40 Ayat (2) tentang pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dialogis;
- Pasal 50 Ayat (5) tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- Pasal 51 Ayat (1) tentang manajemen berbasis sekolah/ satuan pendidikan;
- Pasal 54 Ayat (1) tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tertera pernyataan sebagai berikut:

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan bersikap proaktif dalam menjawab tantangan jaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
4. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
5. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
6. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
7. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, dalam Penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 diuraikan bahwa **reformasi pendidikan** sangat perlu dilakukan, yaitu:

1. penyelenggaraan pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang **berlangsung sepanjang hayat**.

2. perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma "manusia sebagai sumberdaya pembangunan", menjadi paradigma "**manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh**"; agar mampu membentuk manusia seutuhnya maka proses pendidikan harus mencakup:
 - a. penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan;
 - b. pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian;
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta
 - e. pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
3. pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya yang akan dapat menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya.
4. perlunya suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan:
 - a. pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
 - b. proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
 - c. hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
 - d. berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
 - f. berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan

- g. terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Bab Pendahuluan (Alinea 2) dituliskan bahwa:

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan **kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahraga dan olahraga** agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan **tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia**. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Bab II: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum telah dicantumkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sangat bersesuaian dengan 7 (tujuh) kriteria ESD (seperti diuraikan pada Bab 2) yaitu:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
2. Beragam dan Terpadu
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
6. Belajar sepanjang hayat
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses juga menyuratkan adanya pembelajaran berbasis *student center*, terpadu (*holistic*), dan keberagaman budaya sesuai kondisi daerah setempat.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas) Tahun 2010-2014 telah menggariskan paradigma pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa paradigma *universal* yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
.....menyiapkan manusia indonesia sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi, mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan toleransi dalam keragaman budaya serta sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi.
2. Pengembangan Konvergensi Peradaban
Konvergensi peradaban terjadi saat banyak pemangku kepentingan menyadari perlunya belajar dan membagi pengetahuan, sains, dan teknologi atas dasar saling mengakui, menguntungkan, dan menghormati. Pendidikan memegang peranan penting dalam proses ini. Sebagaimana diakui oleh UNESCO, salah satu pilar pendidikan yang sesuai adalah belajar untuk hidup bersama. Dalam komunitas Internasional, hidup bersama berarti hidup diantara banyak peradaban dan penduduk dunia.
3. Pembelajaran Sepanjang Hayat yang Berpusat pada Peserta Didik
Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung

seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat dan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, jujur, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif dan berkewirausahaan.

4. Pendidikan untuk Semua

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

5. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B).

Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai

tanggung jawab sosial dan natural kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan.

Dari uraian yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa dasar-dasar kebijakan ESD sudah diletakkan dengan kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, terobosan paradigma pembangunan yang berkelanjutan dalam pendidikan nasional sudah digulirkan. Oleh sebab itu, tindak lanjut dari pelaksanaan dan penerapan di setiap elemen pelaksana pendidikan sangat diperlukan.

3.2 Kebijakan dan Kesepakatan Terkait ESD dalam Pendidikan Nasional

Dasar kebijakan ESD tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikdasmen Depdiknas) dimana telah ditetapkan bahwa penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup dilaksanakan secara integratif yang dituangkan dalam Kurikulum Tahun 1984. Materi kependudukan dan lingkungan hidup masuk dalam semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan.

Pada Tahun 1989-2007, salah satu tema pembangunan berkelanjutan diperkenalkan oleh Ditjen Dikdasmen Depdiknas melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yaitu melaksanakan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2003, Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) mulai dikembangkan di 120 sekolah. Sampai dengan berakhirnya

tahun 2007, proyek PKLH telah berhasil mengembangkan SBL di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan 2 Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG).

Pada Tahun 2008, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas menerbitkan Pedoman ESD. Setahun berikutnya (2009) Balitbang menerbitkan kembali Strategi Nasional Pelaksanaan ESD dan Model Pelaksanaannya melalui Intra dan Ekstrakurikuler. Buku “Panduan Pengintegrasian Nilai-Nilai ESD dalam Pembelajaran” dan “Pokok-Pokok Materi ESD” diterbitkan oleh Balitbang Kemdiknas pada Tahun 2010. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran ESD di sekolah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, yaitu:

- a. terintegrasi pada mata pelajaran,
- b. mata pelajaran yang berdiri sendiri (monolitik),
- c. muatan lokal, dan
- d. kegiatan ekstrakurikuler/program pengembangan diri di sekolah.

Jadi, proses pembelajaran yang sepaham dengan **konsep ESD sudah dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia jauh sebelum istilah ESD diperkenalkan di Indonesia**. Beberapa pendekatan yang sudah dilakukan dan merupakan perwujudan dari kriteria ESD di antaranya adalah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pendekatan tersebut pada prinsipnya diarahkan kepada optimalisasi peran serta (partisipasi) siswa secara aktif, kreatif dan efektif dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang tidak saja sebagai bahan belajar tetapi sebagai media belajar sehingga dapat membentuk prakarsa dan tanggung jawab sosial serta belajar sepanjang hayat.

Selain itu, *Education for All* (EFA) seperti yang diamanatkan dalam MDGs dan UNPDF (dijelaskan dalam Bab 1) telah dilaksanakan oleh Depdiknas pada Tahun 2000 melalui Program 9 Tahun Wajib Belajar. Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menyebutkan perlunya keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam membina dan mengelola sekolah, serta pentingnya Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) dilaksanakan di dalam dan di luar ruang belajar (dalam dan luar kelas) juga telah digagas dan tersurat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003.

Selain melalui pendidikan formal, *Education for Sustainable Development* (ESD) juga diimplementasikan melalui pendidikan nonformal dan informal. Program yang mendukung, yaitu:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Keaksaraan;
3. Pendidikan Kesetaraan;
4. Pendidikan Kursus dan Pelatihan; dan
5. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Rangkuman perkembangan ESD dalam pendidikan di Indonesia diberikan dalam Lampiran 1.

3.3. Program Kerja Sama Bidang Pendidikan Terkait ESD

Depdiknas melalui *Vocational Education Development Center* (VEDC) Malang pada Tahun 1998 – 2000 telah mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG). Dalam program ini telah dilakukan pengembangan materi ajar PLH dan pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru SD, SMP, SMA dan SMK.

Pada Tahun 1996, telah dibuat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan pelatihan PLH di PPPG. Kesepakatan tersebut ditingkatkan menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU) pada Tahun 2005 dan diperbaharui pada Tahun 2010. Program yang dikembangkan bersama adalah Program Adiwiyata. Komponen yang harus dipenuhi sekolah yang akan mengikuti Program Adiwiyata yaitu:

1. Kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan;
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Dalam program Adiwiyata ini, kriteria ESD telah terakomodasi yaitu: adanya partisipasi peserta didik dan keterlibatan masyarakat, adanya beragam metode belajar, adanya pembelajaran berbasis keunggulan lokal, dan aksi-aksi proaktif terkait dengan 11 (sebelas) tema ESD.

Program Adiwiyata pertama kali dilaksanakan di 10 sekolah di Pulau Jawa sebagai sekolah model dengan melibatkan perguruan tinggi dan LSM yang bergerak di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup. Sejak Tahun 2006 sampai 2011 sekolah yang ikut partisipasi dalam program Adiwiyata hanya mencapai 1.351 sekolah dari 251.415 sekolah (SD, SMP, SMA, SMK). Sekolah yang memperoleh Adiwiyata Mandiri : 56 sekolah, Adiwiyata: 113 sekolah, calon Adiwiyata 103 sekolah; total yang mendapat penghargaan Adiwiyata mencapai 272 Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) se-Indonesia yang sebarannya sebagian besar di pulau Jawa, Bali dan ibu kota provinsi lainnya. Jumlah sekolah Adiwiyata Nasional meningkat menjadi 200 sekolah dan Adiwiyata Mandiri mencapai 67 sekolah di Tahun 2012. Pada Tahun 2013, terjadi peningkatan dimana sekolah yang mengikuti program Adiwiyata berjumlah 4.132 dari 33 provinsi dan sekolah yang mencapai kriteria nasional adalah 463 sekolah dari 19 provinsi serta 130 sekolah Adiwiyata Mandiri.



Bab 4

PENGARUSUTAMAAN (MAINSTREAMING) ESD DALAM KURIKULUM 2013

Konsep Kurikulum 2013 sesungguhnya merupakan perwujudan dari ESD. Faktor-faktor yang menjadi dasar pengembangan Kurikulum 2013, karakteristik, tujuan, kerangka dasar, dan struktur Kurikulum 2013 telah dijelaskan dalam Permendikbud No 67/2013 (untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah), Permendikbud No 68/2013 (untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah), Permendikbud No 69/2013 (untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah), dan Permendikbud No 70/2013 (untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan). Dalam Permendikbud No 81A Tahun 2013 telah diatur mekanisme penyusunan dan pengelolaan Kurikulum 2013 serta pedoman pengembangan Muatan Lokal yang berorientasi dengan ESD. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan Kurikulum 2013 telah diatur dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pengembangan Kurikulum 2013

Faktor-faktor yang menjadi dasar pengembangan Kurikulum 2013 yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013 telah mengakomodasi 7 (tujuh) kriteria ESD, yaitu:

a. Tantangan internal

Tantangan internal terbesar adalah mengupayakan sumber daya manusia usia produktif dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan.

b. Tantangan eksternal

Tantangan eksternal adalah mengupayakan sumber daya manusia usia produktif dapat mengantisipasi arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

c. Perubahan pola pikir

1. pola pembelajaran yang berpusat pada guru berubah menjadi **pembelajaran berpusat pada peserta didik**. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
2. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) berubah menjadi pembelajaran **interaktif (interaksi guru - peserta didik - masyarakat - lingkungan alam, sumber / media lainnya)**;
3. pola pembelajaran terisolasi berubah menjadi pembelajaran secara **jejaring** (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
4. pola pembelajaran pasif berubah menjadi **pembelajaran aktif-mencari** (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
5. pola belajar sendiri berubah menjadi **belajar kelompok** (berbasis tim);
6. pola pembelajaran alat tunggal berubah menjadi **pembelajaran berbasis multimedia**;
7. pola pembelajaran berbasis massal berubah menjadi sesuai **kebutuhan pelanggan (users)** dengan memperkuat

pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;

8. pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) berubah menjadi **pembelajaran ilmu pengetahuan jamak** (*multidisciplines*); dan
9. pola pembelajaran pasif berubah menjadi **pembelajaran kritis, bernalar dan konstruktif**

d. Penguatan Tata Kelola

1. tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi **tata kerja yang bersifat kolaboratif**;
2. **penguatan manajemen sekolah** melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan
3. **penguatan sarana dan prasarana** untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

e. Penguatan Materi

Penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik.

4.2 Karakteristik Kurikulum 2013

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
6. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

4.3 Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan kritis serta mampu bertanggung jawab dan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

4.4 Kerangka Dasar Kurikulum 2013 dan Struktur Kurikulum Sekolah

Pasal 1 Ayat (1) pada Permendikbud No 67/2013, Permendikbud No 68/2013, Permendikbud No 69/2013, dan Permendikbud No

70/2013 menjelaskan bahwa **Kerangka Dasar** Kurikulum Sekolah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah.

A. Landasan Filosofis

Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada **budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang**. Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama pendidikan nasional.
2. Peserta didik adalah **pewaris budaya bangsa yang kreatif**. Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan budaya untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
3. Pendidikan ditujukan untuk **mengembangkan kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik dan spritual**.
4. Pendidikan untuk **membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu** dengan berbagai kemampuan intelektual, nalar, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan

berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu berpikir kritis, reflektif, inovatif, dan transformatif bagi penyelesaian beragam masalah di masyarakat, serta dapat membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

B. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori:

1. Pendidikan berdasarkan **standar** (*standard-based education*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
2. Kurikulum berbasis **kompetensi** (*competency-based curriculum*). Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan

4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 1 Ayat 2 (Permendikbud No 67/2013, Permendikbud No 68/2013, Permendikbud No 69/2013, dan Permendikbud No 70/2013) juga menjelaskan bahwa **Struktur Kurikulum** Sekolah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti.

4.5 Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum 2013

Sesuai Permendikbud No 81A Tahun 2013 tentang “Implementasi Kurikulum 2013”, penyusunan Kurikulum 2013 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia;
2. kebutuhan kompetensi masa depan;
3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;
4. keragaman potensi, karakteristik daerah dan lingkungan;
5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
6. tuntutan dunia kerja;
7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

8. agama;
9. dinamika perkembangan global;
10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan;
11. kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
12. kesetaraan gender; dan
13. karakteristik satuan pendidikan (kesesuaian dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan)

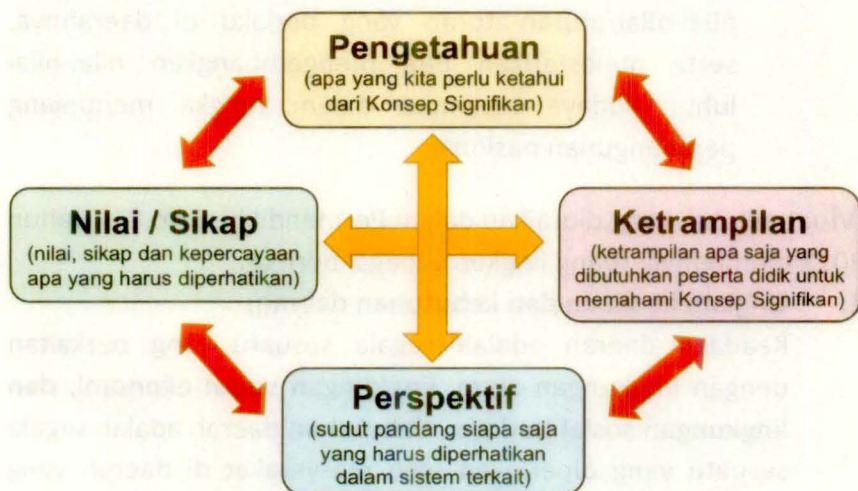
Mekanisme pengelolaan implementasi kurikulum yang diuraikan dalam Permendikbud No 81A Tahun 2013 sangat bersesuaian dengan tujuh kriteria ESD, yaitu

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
2. Beragam dan terpadu
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
6. Belajar sepanjang hayat
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah

Permendikbud No 81A Tahun 2013 juga mengamanatkan bahwa Kurikulum 2013 harus dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh tim penyusun (guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota) dengan melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan.

Prinsip-prinsip yang dikembangkan melalui Kurikulum 2013 itu pada dasarnya bermuara kepada upaya untuk memberdayakan dan membisakan setiap individu untuk berperan-serta dalam masyarakat dan membantu individu untuk memahami

kompleksitas lingkungan dengan mengintegrasikan faktor-faktor sosial-ekonomi, ekologi, budaya, etika sehingga dapat menjaga keberlangsungan pembangunan (*sustainable development*). Dengan demikian maka Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, kreatif, kritis, inovatif, proaktif, mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban nasional serta memahami inti permasalahan global (11 tema ESD) melalui **penguatan sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keberagaman perspektif yang berbeda** (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Kompetensi peserta didik yang dirancang melalui Kurikulum 2013.

4.6 Pengembangan Muatan Lokal

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk **membentuk pemahaman peserta didik**

terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Dalam Permendikbud No 81A Tahun 2013 diuraikan **manfaat muatan lokal** yaitu untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
2. memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Muatan lokal yang diuraikan dalam Permendikbud No 81A Tahun 2013 mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah;

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan **lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya**. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan khususnya untuk **kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat** tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan, seperti kebutuhan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan **kebudayaan daerah**;
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang yang sesuai dengan keadaan **perekonomian daerah**;
- c. meningkatkan **penguasaan Bahasa Inggris** untuk keperluan peserta didik dan untuk mendukung

pengembangan **potensi daerah**, seperti potensi pariwisata; dan

d. meningkatkan kemampuan **berwirausaha**.

2. **Lingkup isi/jenis muatan lokal.**

Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: **bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah** dimana sekolah berada.

Pengembangan muatan lokal untuk sekolah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. **Utuh**; pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.
2. **Kontekstual**; pengembangan pendidikan muatan lokal didasarkan pada budaya, potensi, dan masalah daerah.
3. **Terpadu**; pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.
4. **Apresiasi**; hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukkan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah.
5. **Fleksibel**; jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
6. **Pendidikan sepanjang hayat**; pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus.

7. **Manfaat;** pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

4.7 Standar Proses Pendidikan

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi dan standar isi yang telah ditetapkan dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang telah diperbaharui menjadi PP No 32 Tahun 2013.

Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara:

1. interaktif,
2. inspiratif,
3. menyenangkan,
4. menantang,
5. memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
6. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketercapaian kompetensi lulusan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan:

1. perencanaan pembelajaran,
2. pelaksanaan proses pembelajaran, dan
3. penilaian proses pembelajaran.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan:

1. perubahan paradigma pembelajaran dari peserta didik **diberi tahu** menuju peserta didik **aktif mencari tahu**;
2. perubahan paradigma pembelajaran dari guru sebagai **satu-satunya sumber belajar** menjadi **belajar berbasis aneka sumber belajar**;
3. perubahan paradigma pembelajaran dari pendekatan **tekstual** menuju **proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah**;
4. perubahan paradigma pembelajaran dari **pembelajaran berbasis konten** menuju **pembelajaran berbasis kompetensi**;
5. perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran **parsial** menuju **pembelajaran terpadu**;
6. perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang menekankan pada **jawaban tunggal** menuju pembelajaran dengan **jawaban yang kebenarannya multi dimensi**;
7. perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran **verbalisme** menuju **keterampilan aplikatif**;
8. peningkatan dan keseimbangan antara **keterampilan fisik (hardskills)** dan **keterampilan mental (softskills)**;
9. pembelajaran yang mengutamakan **pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat**;
10. pembelajaran yang menerapkan **nilai-nilai dengan memberi keteladanan** (*ing ngarso sung tulodo*), **membangun kemauan** (*ing madyo mangun karso*), dan **mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran** (*tut wuri handayani*);
11. pembelajaran yang berlangsung **di rumah, di sekolah, dan di masyarakat**;

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa **“siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.**
13. pemanfaatan **teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran;** dan
14. pengakuan atas **perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.**

Kebijakan yang ada di Kurikulum 2013 yang mendukung implementasi ESD di Sistem Pendidikan Nasional diberikan dalam Lampiran 2.

Bab 5

KISAH SUKSES IMPLEMENTASI ESD

Konsep ESD pada kenyataannya telah sejak lama dipraktikkan di satuan pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Dalam bab ini disajikan contoh-contoh kisah sukses implementasi sepuluh dari sebelas tema ESD pada 20 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta pendidikan Non Formal.

1. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)



Pengamatan sumber keanekaragaman hayati (SD Al Hidayah International Green School)



Pengamatan keanekaragaman hayati (SDN 12 Benhil)



Mengamati kehidupan orang utan sebagai hewan khas Kalimantan yang perlu dilestarikan (SMAN 1 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah)



Pembelajaran keanekaragaman hayati (SMAN 10 Malang)



Pembelajaran keanekaragaman hayati (SMK Wikrama)

2. Pendidikan Perubahan Iklim (*Climate Change Education*)



Praktek membuat kompos (SDN Percobaan Palangkaraya)



Praktek membuat kompos, dipandu oleh guru sekolah (SDNP Johan Pahlawan)



Pemanfaatan Asap Sekam Cair sebagai Energy Alternatif, dan pembuatan biogas (SMAN 2 Temanggung)



Oxygen Invest sebagai investasi bentuk komitmen penghijauan sekolah kepada lingkungan sekitar (SMAN 2 Temanggung)



Pelatihan Pembuatan kompos (SMAN 10 Malang)



Pembuatan Solar Cell
(SMPN 1 Kediri)



Pembuatan Gas Metana
(SMPN 1 Kediri)



Pelatihan Pembuatan kompos
(SMKN 2 Bekasi)

Ikut berpartisipasi
dalam memperingati
earth hour (SMAN 10
Malang)



3. Pengurangan Resiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*)



Simulasi pemadam kebakaran
(SD Al Hidayah International
Green School)



Simulasi Vulcano(SD Al Hidayah
International Green School)



Biopori (SDN 12 Benhil)



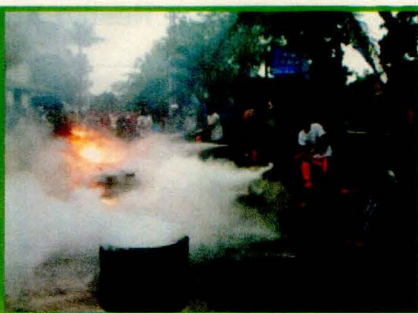
Biopori (SDNP Johan Pahlawan)



Biopori (SMPN 1 Kediri)



Biopori (SMAN 6 Padang)



Simulasi pemadaman kebakaran (SMAN 10 Malang)



Pembuatan Biopori (SMKN 2 Bekasi)



Pembuatan Biopori (SMAN 5 Bandung)

4. Keanekaragaman Budaya (*Cultural Diversity*)



Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup (SDN 12 Benhil)



Pekan Budaya (SD Cendekia Leadership)



Tari Saman
(SMP Muhammadiyah 8 Bandung)



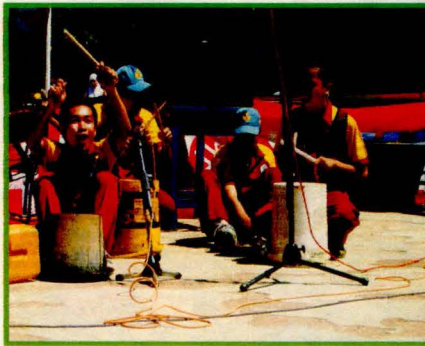
Penampilan angklung
(SMP Muhammadiyah 8 Bandung)



Pembelajaran tentang wayang
(SMPN 1 Lembang)



Membuat batik (SMAN 10 Malang)

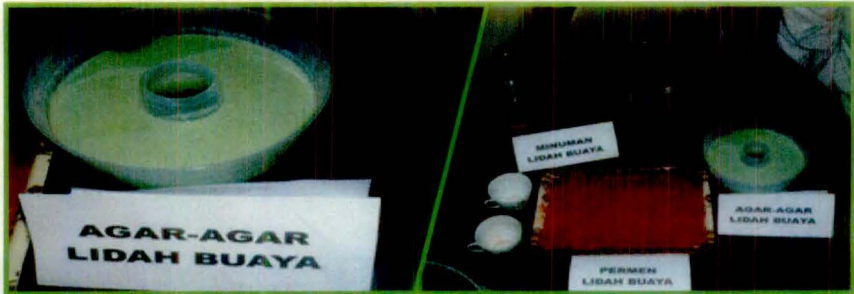


Permainan musik dari barang bekas atau ansambel/Perkusi
(SMKN 2 Bekasi)



Pawai Budaya (SMKN 2 Bekasi)

5. Pengurangan Kemiskinan (*Poverty Reduction*)



Pemanfaatan lidah buaya menjadi agar-agar, minuman lidah buaya dan permen lidah buaya (SDN 12 Benhil)



Pembuatan keripik pisang (SMP Islam Al Azhar 1)



Pengolahan hasil pangan
(SMAN 2 Temanggung)

Pengolahan labu kuning
(SMAN 2 Temanggung)



Hasil keterampilan siswa yang dibuat dari bahan bekas seperti bekas tempat minuman mineral, plastik, kulit kerang, tisu bekas dan lain-lain
(SDNP Johan Pahlawan, Aceh)



Pengolahan limbah dari bekas kantong plastik (SMAN 10 Malang)



Pembuatan sandal, tempat pensil dari barang-barang bekas (SMAN 5 Bandung)



Pengolahan sampah menjadi karya kerajinan (SMAN 6 Padang)

6. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) dalam Pendidikan Non Formal



7. Peningkatan Kesehatan (*Health Promotion*)



Pelatihan dokter kecil (SD Al Hidayah International Green School)



Pemeriksaan kesehatan siswa/cek kesehatan (SD Al Hidayah International Green School)



Para kader memeriksa tekanan darah dan tinggi badan (SMAN 10 Malang)



Pemantauan kualitas udara secara berkala (SMKN 2 Bekasi)



Siswa melakukan patroli sampah, pemilahan sampah (SDN Percobaan Palangkaraya)



Siswa ikut menjaga kebersihan sekolah (SDN 12 Benhil)



Himbauan mengurangi polusi yang disebabkan oleh asap rokok (SDN Percobaan Palangkaraya Kalteng)



Pemeriksaan gigi sisw (SD Cendekia Leadership)



Aksi membersihkan lingkungan sekitar (SMAN 2 Probolinggo)

8. Gaya Hidup (*Sustainable Lifestyles*)



Kepala SMPN 10 dan Camat Kec. Sungai Kunjang beserta aparatnya sedang menanam tanaman penghijauan di areal Tepian Mahakam (SMPN 10 Samarinda)

Goes to school
(SMAN 10 Malang)



Bersepeda ke sekolah dan ke tempat kerja (SMAN 5 Bandung)



Desa Vokasi Gemawang



Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) Ibnu Hajar



9. Perdamaian dan Keselamatan Manusia (*Peace and Human Security*)



Perbaikan jalan desa yang dilakukan secara gotong royong (PKBM Agro Wilis)



Kegiatan Palang Merah Remaja/PMR (SMKN 2 Bekasi)



Global youth service day (SD Cendikia Leadership Bandung)

10. Air (Water)



Siswa mengamati sanitasi dan pencemaran sungai
(SD Al Hidayah International Green School)



Pembersihan pantai (SMAN 6 Padang)



Penanaman Mangrove (SMAN 2 Probolinggo)



Penanaman bibit pohon (SDN Percobaan Palangkaraya)



Aksi Penanaman 1000 pohon (SMKN 2 Bekasi)



Launching program Save The Ocean (SD Al Hidayah International Green School)

Bab 6

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI ESD DI INDONESIA

Dalam implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD) di Indonesia, beberapa tantangan perlu diselesaikan dengan cara mengoptimalkan peluang yang ada. Peluang dan tantangan tersebut dapat diuraikan seperti di bawah ini.

6.1 Peluang dalam Implementasi ESD di Indonesia.

Peluang Eksternal

1. Tuntutan masyarakat dunia tentang perlunya ESD dalam rangka menciptakan *global citizenship*.
2. Diperlukan generasi masa depan yang kreatif, kritis, inovatif, reflektif, dan transformatif sesuai dengan tuntutan kemampuan keterampilan Abad-21.

Peluang Internal

1. Peraturan perundang-undangan telah mengarusutamakan ESD dalam sistem pendidikan.
2. Kesadaran masyarakat tentang perlunya masa depan yang berkelanjutan yang dapat dipenuhi melalui pendidikan sejak usia dini.
3. Kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan tentang perlunya pola pembelajaran yang berorientasi ESD.
4. Peserta didik yang cenderung memilih model pembelajaran berbasis keragaman potensi daerah, lingkungan, dan sumber daya alam.

6.2 Tantangan dalam Implementasi ESD di Indonesia.

Tantangan Eksternal

1. Belum semua masyarakat dunia menyadari perlunya untuk menciptakan *global citizenship* dalam menjamin terwujudnya pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua warga dunia pada Tahun 2030 (*ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030*).
2. Belum semua negara menyadari dibutuhkan keterampilan Abad-21 bagi peserta didik danarganya.

Tantangan Internal

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kesadaran tentang pentingnya ESD masih kurang.
2. Semakin banyak jumlah penduduk Indonesia yang memerlukan pendidikan yang berkualitas.
3. Kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menerjemahkan konsep dan nilai-nilai ESD.
4. Kemampuan dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam implementasi ESD.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.
6. Ketersediaan dana.

Daftar Pustaka

- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas (2008), **"Pedoman ESD"**.
- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas (2009), **"Strategi Nasional Pelaksanaan ESD dan Model Pelaksanaannya melalui Intra dan Ekstrakurikuler"**.
- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas (2010), **"Panduan Pengintegrasian Nilai-Nilai ESD dalam Pembelajaran"**.
- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas (2010), **"Pokok-Pokok Materi ESD"**.
- Children's Environmental Literacy Foundation (CELf). <http://celfeducation.org/WhatWeDo.html>
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas (2003), "Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)..." <http://www.menlh.go.id/informasi-mengenai-adiwiyata/>
- Global Footprint Network Living Planet Report (2010). <http://www.footprintnetwork.org/press/LPR2010.pdf>
- Global Footprint Report Network GFN, 2012. <http://collapseofindustrialcivilization.com/tag/peak-soil/>
- Millenium Development Goals (2000). <http://www.un.org/millenniumgoals/>
- Pendidikan yang Interdisiplin dan Holistik (UNESCO Guidelines, 2005) <http://www.esd-j.org/en/whatsesd/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. <https://www.google.com/.....=permendiknas>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
(Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007, tentang
Standar Pengelolaan. [https://www.google.
com/.....=permendiknas](https://www.google.com/.....=permendiknas)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
(Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Sarana dan Prasarana. [https://www.google.
com/.....=permendiknas](https://www.google.com/.....=permendiknas)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
(Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah. [https://www.google.
com/.....=permendiknas](https://www.google.com/.....=permendiknas)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
(Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Guru. <https://www.google.com/.....=permendiknas>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
(Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang
<https://www.google.com/.....=permendiknas>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. [https://
www.google.com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia (Permendikbud) Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. [https://
www.google.com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia (Permendikbud) Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan
Dasar dan Menengah. [https://www.google.
com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

<https://www.google.com/.....=permendikbud>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 67/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah. <https://www.google.com/.....=permendikbud>

[com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah. <https://www.google.com/.....=permendikbud>

www.google.com/.....=permendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 69/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. <https://www.google.com/.....=permendikbud>

[com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 70/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan.

<https://www.google.com/.....=permendikbud>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. <https://www.google.com/.....=permendikbud>

[com/.....=permendikbud](https://www.google.com/.....=permendikbud)

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. <https://www.google.com/...=peraturan+pemerintah+no+32+tahun+2013>

[com/...=peraturan+pemerintah+no+32+tahun+2013](https://www.google.com/...=peraturan+pemerintah+no+32+tahun+2013)

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. [sultra.kemenag.go.id/file/.../PP19th2005 Standar Nasional Pendidikan.pdf](http://sultra.kemenag.go.id/file/.../PP19th2005%20Standar%20Nasional%20Pendidikan.pdf)

Program Adiwiyata. MoU pd tahun 2005 dan diperbaharui pda tahun 2010. <http://adiwiyatahijau.wordpress.com/2010/07/08/pendidikan-lingkungan-hidup/>

The pilars of sutainable Development, "learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do and learning to transform oneself and society." www.unescobkk.org/education/esd-unit/definition-of-esd

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan. http://www.dragageshk.com/sustainable-development_ghe.php

Trilling, Bernie and Charles Fadel (2009), **"21st Century Skills Learning for Life in Our Times"**. Jossey-Bass, a Willey Inprint. www.josseybass.com

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (1945) <https://www.google.co.id/...=undang+undang+dasar+1945>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://www.google.com/.....=undang-undang%20pendidikan%20nasional>

Undang-undang No 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. <https://www.google.com/.....undang-undang%20nomor%2017%20tahun%202005>

United Nations Conference (1972) tentang Lingkungan Hidup, Stockholm <http://www.unep.org/Documents/Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503>. <http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/>

United Nations Partnership for Development Framework / UNPDF
(2005) http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNPDF_with_matrix_hi-res.pdf

United Nation Decade of Education for Sustainable Development / UNDESD (2005-2014). <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629e.pdf>

United State Census Bureau, International Database (June 2011 Update) <https://www.census.gov/>

World Conference on Environmental and Development "The Brundtland Commission" (1987). http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf

World Summit Conference (1992), Environmental Declaration, Rio de Janeiro. <http://www.desd.org/about%20esd.htm>

World Summit on Sustainable Development 2002 di Johannesburg. <http://www.un-documents.net/jburgdec.htm>

LAMPIRAN

Lampiran1: Perkembangan ESD dalam Proses Pembelajaran di Indonesia

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
1	CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)	a. Mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual-emosional siswa dalam proses pembelajaran, dengan pelibatan fisik siswa apabila diperlukan. b. Melihat kegiatan belajar sebagai pemberian makna secara konstruktif terhadap pengalaman oleh pebelajar dan dengan dituntun azas “tut wuri handayani” pengendalian kegiatan belajar harus meletakkan dasar bagi pembentukan prakarsa dan tanggung jawab belajar ke arah belajar sepanjang hayat.	Kurikulum Tahun 1984
2	MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)	Menciptakan Lingkungan Belajar yang Melindungi, Aman, dan Kondusif bagi Anak berdasarkan 3 pilar: a. Manajemen Sekolah: pencapaian pengelolaan sekolah yang transparan dan efisien dan tidak mengecilkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan; b. PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan: Kegiatan belajar-mengajar dan interaksi yang positif antara guru dan siswa di sekolah; c. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan langsung orangtua dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap Hak-Hak Anak	UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 51 (1) PP – SNPT No 19/2005 Pasal 49 ayat 1- 2, Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
3	PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)	Prinsip: - Memahami sifat yang dimiliki anak Suasana pembelajaran dimana guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang subur seperti yang dimaksud. - Mengenal anak secara perorangan Perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. - Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. - Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Berfikir kritis untuk menganalisis masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut, kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. - Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik	Bagian dari kebijakan MBS dan tuntutan kurikulum Tahun 1984

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
		f. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa senang dalam belajar. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram. g. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar melalui interaksi dalam belajar. h. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental dimana aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut ditertawakan, disepelekan, atau dimarahi jika salah.	

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
4.	Kurikulum 1984	Penyampaian mata ajar tentang kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984. Materi kependudukan dan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran pada tingkat menengah umum dan kejuruan.	Kurikulum 1984
5.	Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	Mulai dikembangkan pada tahun 2003 bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu (LPMP) Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG).	Ditjen Dikdasmen Depdiknas (Tahun 1989- 2007) melalui Proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH).
6.	Adiwiyata	a. Kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; serta d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.	Nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional No 03/MEN-LH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang PLH
7.	KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)	Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. b. Beragam dan terpadu c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan e. Menyeluruh dan berkesinambungan f. Belajar sepanjang hayat g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah	Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Tujuh prinsip ESD dikembangkan dan secara eksplisit pada Permendikbud No.81A Lampiran1 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
8.	Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan lingkungan hidup bagi guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan termasuk guru SD, SMP, dan SMA.	Kerja sama Proyek Swiss Contact yang berpusat di VEDC (Vocational Education Development Center) Malang
9.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengenalan nilai-nilai dasar yang sangat fundamental bagi anak: - pengakuan anak sebagai individu yang unik dan memiliki potensi kecerdasan yang diberikan sejak lahir dan harus dikembangkan melalui program yang tepat, - prinsip-prinsip PAUD dikembangkan untuk memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang dan optimal, dan - lingkungan pendukung lainnya yang bisa berfungsi sebagai guru ketiga dalam pembelajaran anak-anak yang terdiri atas lingkungan fisik dan sosial-budaya bersama-sama dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.	
10.	Pendidikan Keaksaraan	Pendidikan keaksaraan dilakukan dengan menyediakan pembelajaran keaksaraan integratif yang mencakup seluruh aspek budaya, lingkungan, ekonomi, dan persoalan kehidupan sehari-hari lainnya dalam skema Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) atau Aksara Agar Berdaya (AkrAB!), yang meliputi Keaksaraan Fungsional, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Seni Budaya Lokal, dan lain-lain.	

No	Program/ Inovasi	Filosofi	Dasar Kebijakan
11.	Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan diberikan untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian pembangunan. Pendidikan Kesetaraan difokuskan pada keterampilan vokasional dan pembentukan sikap kewirausahaan, serta pelatihan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengolahan potensi lokal menjadi komoditas dengan nilai yang lebih tinggi.	
12.	Pendidikan Kursus dan Pelatihan	Pendidikan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang terampil dalam memperoleh mata pencaharian, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, dan protektif terhadap lingkungan sebagai sumber kehidupan.	
13.	Pengarus-utamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pembangunan formal yang masih terbatas penyediaan program pendidikan pemberdayaan perempuan: perluasan akses pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan bagi perempuan dewasa, penyediaan program pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi sumber daya, dan pelaksanaan lokakarya dan pelatihan pendidikan bagi perempuan untuk membekali agar mampu berkerja atau berwirausaha.	

Lampiran 2: Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan Kurikulum 2013 Terkait ESD

Kriteria ESD	Kebijakan Kurikulum Nasional Terkait ESD (Kurikulum 2013)
1. Fokus pada pembelajar (learner-centred)	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 b. Lampiran 1 Permendikbud No.81A tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada bagian VI. Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan di bagian B. Prinsip-Prinsip Penyusunan di no 3; dan di bagian C. Mekanisme Pengelolaan di no. 1 c. Lampiran IV Permendikbud No.81 A/ 2013 Tentang Implementasi Kurikulum: Pedoman Umum Pembelajaran pada bagian V. Konsep dan Strategi Pembelajaran. d. Permendikbud no. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah Bab I. Pendahuluan pada Prinsip Pembelajaran no 1 dan 2 dan Bab III. Perencanaan Pembelajaran, bagian A. Desain Pembelajaran no. 3 Prinsip Penyusunan RPP. e. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI, Pada bagian c. penyempurnaan pola pikir no. 1), 2), 3) dan 4). f. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs, Pada bagian c. penyempurnaan pola pikir no. 1), 2), 3) dan 4). g. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA, Pada bagian c. penyempurnaan pola pikir no. 1), 2), 3) dan 4). h. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK. Pada bagian c. penyempurnaan pola pikir no. 1), 2), 3) dan 4).
2. Pendekatan interdisiplin dan holistik (inter discipline and holistic approach)	a. Lampiran 1: Permendikbud No. 81 Atahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan KTSP pada bagian C Mekanisme Pengelolaan pada prinsip pengelolaan KTSP no. 2 dan 5. b. Permendikbud No. 65/ 2013 tentang Standar Proses pada Bab II. Karakteristik Pembelajaran, dan Bab III Tentang Perencanaan Pembelajaran pada A. no 3 tentang Prinsip Penyusunan RPP bagian f dan g; c. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; d. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; e. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; f. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK.

Kriteria ESD	Kebijakan Kurikulum Nasional Terkait ESD (Kurikulum 2013)
3. Pendidikan yang menggunakan pendekatan beragam metode	a. Lampiran IV Permendikbud No.81 A/ 2013 Tentang Implementasi Kurikulum: Pedoman Umum Pembelajaran pada bagian V. Konsep dan Strategi Pembelajaran b. Permendikbud No. 65/ 2013 tentang Standar Proses bab II. Karakteristik Pembelajaran. c. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir; d. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir; e. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir, f. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK.
4. Pendidikan berbasis pada pendekatan berpikir sistem	a. Lampiran 1: Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan KTSP pada bagian B Prinsip penyusunan KTSP no. 3. b. Lampiran IV Permendikbud No.81A/2013 tentang Pedoman Umum Pembelajaran Bab I. V. Konsep dan Strategi Pembelajaran A. Pandangan Tentang Pembelajaran B. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung; C. Perencanaan Pembelajaran; 2. Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP dan 4. Langkah-Langkah Pengembangan RPP c. Permendikbud No.65/2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bab II. Karakteristik Pembelajaran (prinsip-prinsip pembelajaran) Bab III. 3. Prinsip Penyusunan KTSP d. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir, I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis, B Landasan Teoritis e. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir, I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis, B Landasan Teoritis

Kriteria ESD	Kebijakan Kurikulum Nasional Terkait ESD (Kurikulum 2013)
	f. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir, I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C:Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis, B Landasan Teoritis g. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK; bagian I. Pendahuluan bagian A.2.c. Penyempurnaan Pola Pikir, I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C:Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis, B Landasan Teoritis.
5. Pendidikan yang memunculkan “nilai”;	a. Permendikbud No. 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Dasar dan Menengah. II. Kompetensi Lulusan SD/ MI/ SDLB/ Paket A dimensi Sikap III. Kompetensi Lulusan SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B dimensi Sikap; IV. Kompetensi Lulusan SMA/ MA/ SMK/ MAK/ SMALB /Paket C dimensi Sikap. b. Lampiran 1 Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada bagian VI. B. Prinsip-Prinsip Penyusunan KTSP no 1, 2, 3, 8, 10, 11, dan 12; dan di bagian C. Mekanisme Pengelolaan (prinsip pengelolaan KTSP) no. 1 dan 2. c. Permendikbud No. 64 tahun 2013 tentang Standar Isi pada Bab I. Pendahuluan dan Bab II. Tingkat Kompetensi (tingkat kompetensi Spiritual dan tingkat Kompetensi sosial) d. Permendikbud No. 65/2013 tentang Standar Proses yang tertuang dalam Bab I. Pendahuluan tentang prinsip pembelajaran butir 8 dan 10. e. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; bagian I B:Karakteristik Kurikulum 2013 no. 1, 3, dan 4 dan I C:Tujuan Kurikulum 2013, bagian II. Kerangka Dasar Kurikulum A. Landasan Filosofis. III. Struktur Kurikulum, A. Kompetensi Inti – 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti – 2 (KI-2). f. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; Bagian I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C:Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka Dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis. III. Struktur Kurikulum, A. Kompetensi Inti – 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti – 2 (KI-2).

Kriteria ESD	Kebijakan Kurikulum Nasional Terkait ESD (Kurikulum 2013)
	g. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; Bagian I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis. III. Struktur Kurikulum, A. Kompetensi Inti – 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti – 2 (KI-2). h. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK. bagian I B: Karakteristik Kurikulum 2013 dan I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis. III. Struktur Kurikulum, A. Kompetensi Inti – 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti – 2 (KI-2).
6. Pendidikan yang mengedepankan pendekatan pendekatan kultur lokal, isu lokal disamping isu global dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak.	a. Lampiran I Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada bagian VI. B. Prinsip-Prinsip Penyusunan KTSP no 10, 11; dan di bagian C. Mekanisme Pengelolaan (prinsip pengelolaan KTSP) no. 2 dan 7. b. Lampiran II Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum: Pedoman Pengembangan Muatan Lokal. c. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; bagian I C: Tujuan Kurikulum 2013; II. Kerangka Dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis d. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; Bagian I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka Dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis. e. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; Bagian I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis. f. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK. bagian I C: Tujuan Kurikulum 2013, II. Kerangka dasar Kurikulum bagian A. Landasan Filosofis.
7. Belajar sepanjang hayat (lifelong learning)	a. Lampiran 1 Permendikbud No.81A pada bagian C tentang prinsip pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) no. 6 b. Lampiran IV: Permendikbud No.81 A/ 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman Umum Pembelajaran, bagian V. A. Pandangan tentang Pembelajaran.

Kriteria ESD	Kebijakan Kurikulum Nasional Terkait ESD (Kurikulum 2013)
	c. Permendikbud No. 67/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SD/ MI; bagian I A. 2. C. 3). d. Permendikbud No. 68/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMP/ MTs; Bagian I A. 2. C. 3) e. Permendikbud No. 69/ 2013 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum SMA/ MA; Bagian I A. 2. C. 3) f. Permendikbud No. 70/ 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/ MAK Bagian I A. 2. C. 3).



**Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon: 021-5711144 (Hunting)
Website: <http://www.kniu.kemdikbud.go.id>

ISBN : 978-602-70365-1-2

